



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD RACHMAT**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **671011**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 580.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/88 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. Tanah Seluas 533 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 50.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 278.450.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000
2. LAINNYA, LG MESIN CUCI Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000
3. LAINNYA, SHARP TV TABUNG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 400.000
4. LAINNYA, SHARP TV LCD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000
5. LAINNYA, LG LEMARI ES Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 250.000



6. LAINNYA, LG MESIN CUCI Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
400.000

7. MOBIL, RAIZE MINI BUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.850.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 868.650.000

III. HUTANG Rp. 208.240.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 660.410.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.